

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mempergunakan sistem pemerintahan demokrasi. Dengan begitu, Indonesia menitik beratkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Banyak kalangan menyatakan bahwa dewasa ini Indonesia telah menjadi salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia bersama dengan USA dan India. Secara konstitusional ini telah dinyatakan baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. Pasal 1 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penilaian seperti ini amat kuat mengkarakterisasi kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama setelah era reformasi dan demokratisasi di Indonesia pasca lengsernya pemerintahan demokrasi totaliter ala orde baru (Tim ICCE, 2003; Sukadi, 2006).

Jika dilihat dari kondisi geografis, latar historis, dan karakteristik sosiobudaya merupakan suatu keniscayaan bagi masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang pluralistik ini juga menghendaki kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan (*bhinneka tunggal ika*). Melalui sistem dan mekanisme kehidupan demokratislah diyakini bahwa masyarakat Indonesia akan tetap dapat menghargai dan toleran terhadap berbagai perbedaan (suku, ras, agama, adat istiadat, stratifikasi sosial, klasifikasi dan segregasi sosial, bahasa, kesenian, jenis kelamin, asal daerah, dsb.) tetapi dapat memelihara tetap tegaknya NKRI.

kehidupan masyarakat Indonesia dimana nilai-nilai agama, adat istiadat dan tradisi leluhur, Pancasila, serta jiwa modernisasi yang berbasis iptek menjadi landasan dan orientasi ideologisnya. Inilah yang kemudian diformulasikan menjadi sistem demokrasi Pancasila yang berpilar kecerdasan, kebijaksanaan, dan spiritualitas (Winataputra, 2005 ; Sukadi 2006).

Dengan demikian Demokrasi belum banyak dimaknai secara sosial budaya sebagai bentuk eksperimen kehidupan baik secara personal dan sosial yang menggunakan pilar kecerdasan, kebijaksanaan, spiritualitas, dan partisipasi aktif dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam masyarakat menuju kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan yang lebih baik dengan landasan nilai-nilai kearifan lokal, agama, Pancasila, dan UUD 1945. Tidak mengherankan kemudian jika banyak konflik kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat yang pemecahannya malah dapat mengikis keyakinan dan sikap masyarakat terhadap citra kehidupan demokrasi. Karena itulah tentu diperlukan wahana pendidikan yang memungkinkan warga masyarakat dan warga negara belajar kehidupan demokratis baik yang bersifat formal maupun substansial. Di sinilah juga kemudian menjadi urgennya peran dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi di Indonesia (Tim ICCE, 2003; Winataputra, 2005 ; Sukadi 2006).

PKn memiliki misi sosio-paedagogis, sosio-akademis, dan sosio-kultural. Dalam misi sosio-paedagogis PKn berfungsi melaksanakan program pendidikan demokrasi dengan melibatkan aktivitas mengenal demokrasi, membangun demokrasi, dan melakukan demokrasi di dalam kelas. Melalui misi sosio-akademis PKn berfungsi menjadi wahana belajar bagi peserta didik untuk

melakukan inkuiri, pembelajaran berbasis masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir evaluatif dan reflektif terhadap realitas kehidupan demokrasi dalam masyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Melalui misi sosio-kultural, akhirnya, PKn berfungsi menjadi wahana mengembangkan aktivitas demokrasi secara riil di dalam masyarakat melalui tindakan partisipatif sebagai aktor sosial terutama dalam upaya ikut merumuskan keputusan-keputusan kebijakan publik yang dapat disumbangkan dalam rangka proses rekayasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Depdiknas, 2008 ; Sukadi 2006).

Mewujudkan PKn dalam misi Pendidikan Demokrasi seperti gambaran di atas secara aktual membutuhkan paling tidak empat komponen pokok. Pertama, pembelajaran PKn haruslah dapat mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator-indikator hasil belajar yang merujuk pada pengembangan kemampuan berdemokrasi peserta didik. Kedua, pembelajaran PKn sebagai konsekuensinya tentu memerlukan juga pokok-pokok materi yang terkait dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip demokrasi serta aplikasinya dalam kehidupan ketatanegaraan, tata pemerintahan, dan tata kemasyarakatan di Indonesia. Ini tidaklah berarti bahwa semua pokok materi di dalam PKn hanya membahas tentang konsep kehidupan demokrasi. Ketiga, pembelajaran PKn juga membutuhkan guru yang tidak saja memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang kehidupan demokrasi, tetapi juga haruslah memiliki nilai-nilai dan komitmen serta keterampilan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini penting karena guru adalah tauladan bagi peserta didik. Keempat, pembelajaran PKn itu sendiri haruslah menjadi wahana belajar kehidupan berdemokrasi secara

riil bagi peserta didik. Ini artinya bahwa pembelajaran PKn mestilah menggunakan model, pendekatan, strategi, serta metode-metode pembelajaran yang berbasis dan berorientasi demokrasi. Penggunaan berbagai inovasi pembelajaran seperti CTL, problem-based learning, inquiry, cooperative learning, dan value analysis, debat publik, proyek atau praktik belajar kewarganegaraan, dan sejenisnya yang seluruhnya berbasis konstruktivisme sosial adalah penting dan harus diterapkan dalam pembelajaran PKn sebagai wahana Pendidikan Demokrasi. (Depdiknas, 2008 ; Sukadi 2006).

Dari misi diatas masalahnya adalah, apakah praktik PKn di sekolah , khususnya di SMPN 2 Sawan, sudah mengemban misi Pendidikan Demokrasi seperti di atas. Hasil studi pendahuluan memang menunjukkan bahwa pengajar atau pendidik PKn di Sekolah ini memang seluruhnya berasal dari jurusan PPKn. Diyakini, seluruh Guru PKn telah memiliki bekal minimal diklat dan kompetensi yang sama untuk mengemban praktik PKn dalam misi Pendidikan Demokrasi. Tetapi, diketahui pula bahwa latar pendidikan tinggi para guru pengajar serta orientasi nilai dan komitmennya cukup bervariasi. Sampai saat ini belum ada upaya studi evaluasi tentang seberapa efektif misi pendidikan demokrasi telah diemban para Guru dalam menyelenggarakan pembelajaran PKn sebagai salah satu mata kuliah MPK. Penelitian ini diyakini menjadi sangat penting dilakukan oleh pusat penelitian Ideologi dan Demokrasi untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah SMPN 2 Sawan. Karena keterbatasan sumber daya, penelitian ini tidak dapat dilakukan secara utuh melalui studi evaluasi yang komprehensif tentang efektivitas pembelajaran PKn dalam mengemban misi pendidikan demokrasi di lingkungan SMPN 2 Sawan. Penelitian

ini dibatasi dan difokuskan pada Guru serta Siswa MPN 2 Sawan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam misi Pendidikan Demokrasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah tertulis di atas maka, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan dari penelitian yang dilakukan. Adapun identifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Dalam mewujudkan misi PKn sebagai Pendidikan demokrasi, Guru sangat berperan penting dalam ini untuk mendidik siswa disekolah. Karena guru menjadi tauladan untuk peserta didik. Ini penting agar PKn dapat memiliki peran dan fungsi yang strategis dan vital dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis.
2. Peneliti melakukan penelitian terkait bagaimana peran serta apa saja yang dilakukan guru dalam misi PKn dalam mewujudkan pendidikan demokrasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan yang akan di bahas yaitu peran Guru dalam mewujudkan misi PKn sebagai Pendidikan Demokrasi di sekolah serta hal-hal apa saja yang dilakukan oleh guru PKn serta profil siswa dalam mengimplementasikan PKn sebagai pendidikan demokrasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Guru dalam mewujudkan misi PKn sebagai Pendidikan Demokrasi di SMPN 2 Sawan ?
2. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mewujudkan misi PKn sebagai Pendidikan Demokrasi di SMPN 2 Sawan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana peran Guru dalam mewujudkan misi PKn sebagai Pendidikan Demokrasi.
2. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mewujudkan misi PKn sebagai Pendidikan Demokrasi di sekolah
3. Bagaimana profil siswa SMPN 2 Sawan dalam mengimplementasikan PKn sebagai Pendidikan Demokrasi

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoretis maupun pragmatis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat membantu menyumbangkan pemikiran teoretis untuk kepentingan mengembangkan model pembelajaran PKn yang efektif dalam mengemban misi pendidikan demokrasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam

rangka menyusun buku dan LKS pedoman untuk para guru PKn sehingga mereka secara keseluruhan memiliki komitmen yang sama dalam mengembangkan praktik pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi yang efektif.

